

**PERSEPSI MASYARAKAT ISLAM KOTAGEDE TERHADAP
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

TESIS

Diajukan Kepada
Program Studi Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister dalam Ilmu Agama Islam
(Sosial Budaya Islam)



Oleh

NUR ROHMAH
NIM : 0000980006

**PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan Barat, yang dimulai dari Perancis, salah satu penyebabnya adalah karena berkembangnya tradisi pendidikan di sana, yaitu suburnya pendirian Perguruan Tinggi yang disebut Universitas Magistarium (Febrian,2000: 3). Kemajuan seperti itu juga dialami oleh negara berkembang yang lain sampai dengan saat ini.

Memang benar bahwa maju atau mundurnya suatu bangsa amat ditentukan oleh bermutu atau tidaknya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki bangsa bersangkutan. Sumber daya manusia yang bermutu salah satu di antaranya disebut “intelektual”¹. Kelompok sosial ini salah satu di antaranya adalah produk pendidikan Perguruan Tinggi, karena memang menjadi intelektual itu tidak harus selalu dari lulusan Perguruan Tinggi (Alatas, 1988: 13). Sungguhpun begitu, Perguruan Tinggi tetap menjadi tumpuan harapan sebagai penghasil intelektual yang berguna.

¹ Disebut intelektual adalah orang yang memusatkan diri dalam memikirkan ide dan masalah yang nonmaterial dengan menggunakan kemampuan penalarannya. Ciri-ciri kaum intelektual ini antara lain, *pertama*, berasal dari berbagai kelas sosial dalam proporsi yang berbeda-beda. *Kedua*, dapat ditemukan dalam komunitas pendukung atau penentang gerakan kebudayaan atau politik. *Ketiga*, pekerjaan yang ditekuni bukan pekerjaan tangan (kasar), melainkan pekerjaan seperti dosen, penulis, penyair, wartawan dan sebagainya. *Keempat*, biasanya agak berjarak dengan masyarakat dan lebih sering bergaul dengan kelompok sendiri. *Kelima*, disamping tertarik kepada dunia ilmu dan teknik, juga tertarik kepada masalah keagamaan, seni, rasa kebangsaan, perekonomian, kebudayaan, dan kemajuan hidup pada umumnya ; cara pandangannya berperspektif luas dan sinergi (saling keterkaitan). *Keenam*, pada umumnya hanya terdiri dari sebagian kecil dari masyarakatnya (Alatas, 1988: 12,13).

Tidak diragukan lagi, bahwa Perguruan Tinggi merupakan pilar agen perubahan masyarakat di negara maju maupun berkembang, apalagi di negara yang masih terbelakang. Sebab, Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan yang sanggup memasok sumber daya manusia yang bisa menghasilkan produk-produk pemikiran secara inovatif, temuan ilmu dan anak kandungnya, yaitu teknologi dan seni.

Ada beberapa macam Perguruan Tinggi yang dikembangkan di Indonesia, yaitu Program Diploma, Akademi, Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas.² Hal ini cukup menarik dari sudut nama; di Indonesia dikenal juga label “Islam”, seperti Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Universitas Islam Negeri (UIN). Pelabelan “Islam” di sini pada umumnya didasarkan pada perspektif epistemologis keilmuan Islam. Sedangkan label “negeri” adalah untuk membedakan badan pengelola yang memayunginya, yaitu negara, dalam hal ini di bawah Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI)³. Salah satu UIN yang ada di Indonesia adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Sunan Kalijaga) di Yogyakarta.

Sebagaimana Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang lain, UIN Sunan Kalijaga juga tetap sangat memperhatikan “studi keislaman” (*Islamic*

² Program Diploma adalah lembaga pendidikan yang menawarkan program bidang tertentu dalam jenjang diploma. Akademi adalah lembaga pendidikan dalam bidang tertentu setingkat dengan sarjana muda. Sekolah tinggi adalah lembaga pendidikan yang terdiri dari hanya 1 (satu) fakultas untuk meraih jenjang kesarjanaan. Sementara Institut adalah lembaga pendidikan dalam rumpun ilmu tertentu yang terdiri dari beberapa fakultas dan menawarkan jenjang kesarjanaan, baik Strata 1 (S-1), Strata 2 (S-2, Magister), maupun Strata 3 (S-3, Doktor). Sedangkan Universitas adalah lembaga pendidikan yang menawarkan kesarjanaan (S-1, S-2, S-3) dalam berbagai rumpun ilmu yang terkonsentrasi dalam berbagai fakultas.

³ Perguruan Tinggi yang dikelola negara yang lain, terutama yang tergolong ilmu non agama (sekuler), dikelola oleh Depdiknas RI. Disamping itu, Depag RI maupun Depdiknas RI juga ikut mengawasi dan mengkoordinasi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh badan-badan swasta.

studies). Menurut Azyumardi Azra, yang dimaksud dengan “studi keislaman” di sini adalah : studi tentang keseluruhan aspek peradaban Islam dan kehidupan muslim pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang (Azra, 1999: 22). Secara sederhana, sekarang ini studi keislaman dijabarkan berupa pembagian fakultas, meliputi : Adab, Dakwah, Syari’ah, Tarbiyah dan Ushuluddin⁴.

Sejak masih bernama Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) lalu berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan saat ini menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Sunan Kalijaga), secara **de facto** lembaga pendidikan ini telah menghasilkan lebih dari 32.695 orang, 226 orang di antaranya bergelar Doktor dan 1.540 orang bergelar Magister. (UIN Sunan Kalijaga, 2009: vi). Ini merupakan salah satu indikator bahwa UIN Sunan Kalijaga telah memperoleh apresiasi yang cukup. Namun begitu, sesuai hukum perkembangan zaman, bisa saja apresiasi masyarakat berubah.

Berbicara tentang masyarakat pengguna jasa (*stakeholders*) UIN Sunan Kalijaga yang masih tetap sangat memperhatikan studi keislaman, lebih-lebih kalau dikaitkan dengan pengguna jasa adalah “masyarakat Islam”, tentu menjadi sangat menarik. Asumsinya adalah bahwa mestinya masyarakat Islam tersebut sangat menghargai terhadap UIN Sunan Kalijaga yang nampaknya masih memiliki komitmen tinggi terhadap studi keislaman tersebut. Secara normatif, kalau Al-Qur’an menyebut istilah “*tafaqquh fi ad-din*” (memperdalam pengetahuan agama) (QS At-Taubah, 9: 122), maka mestinya masyarakat Islam

⁴ UIN Sunan Kalijaga, berdasar SK Presiden Nomor 50 Tahun 2004, tanggal 21 Juni 2004, berubah menjadi memiliki 7 fakultas dan ditambah 1(satu) program untuk pendidikan Pascasarjana. Fakultas tambahan itu adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (Fak. Isohum) dan Fakultas Sains dan Teknologi (Fakultas Saintek), (Pokja Akademik, 2005: 327 halaman).

tergelitik dan tertarik pada studi keagamaan (keislaman) tersebut. Penulis berasumsi, bahwa dalam hal belajar tentang agama ini barangkali masyarakat Islam tidak sekedar tergiur oleh selembarnya ijazah, gelar kesarjanaan, dan *civil effect* dalam sektor publik atau ekonomi, melainkan juga ada faktor keikhlasan (ketulusan) dalam ber-*tafaqquh fi ad-din* di atas. Tetapi asumsi seperti ini masih perlu diuji lagi kebenarannya dan siapa tahu limbah budaya materialistik dan hedonistik seperti yang terlihat dewasa ini mampu menggoyahkan faktor keikhlasan tersebut.

Studi ini difokuskan terhadap masyarakat Islam Kotagede. Alasannya adalah karena wilayah Kotagede ini boleh dikatakan sebagai daerah “kantong masyarakat Islam” disamping wilayah Wonokromo, Wotgaleh, Nitikan, Karangajen, Kauman, Dongkelan, Babadan, dan Ploso Kuning (Riyadi, 2001: 171 halaman). Bahkan ada yang memberi sebutan Kotagede sebagai “bumi tokoh nasional”; bahwa di sini dilahirkan K.H. Abdul Kahar Muzakir (tokoh perumus dan penanda tangan “Piagam Jakarta”), Prof. Dr. H.M. Rasyidi (Menteri Agama RI yang pertama), H.As’ad Humam (penemu “metode Iqra” untuk dapat cepat membaca Al-Qur’an), dan sebagainya (Riyadi, 2001: 1,2,5,8). Logika yang sama tentu saja dapat diterapkan, yaitu mestinya masyarakat Islam Kotagede juga sangat menghargai dan memiliki komitmen tinggi serta bersemangat mengirimkan anak-anak atau anggota keluarga mereka untuk memasuki dan studi di UIN Sunan Kalijaga yang jelas-jelas tetap mempertahankan studi keislaman. Tentu saja asumsi seperti ini perlu dicari jawabannya, apakah benar demikian itu.

Untuk mencari jawaban terhadap asumsi di atas, penulis membatasi pada masalah persepsi yang ada dan berkembang dalam masyarakat Islam Kotagede terhadap UIN Sunan Kalijaga. Alasannya adalah bahwa segala tindakan manusia terhadap sesuatu biasanya dilatarbelakangi oleh terbangunnya persepsi tertentu sebelumnya. Kalau masalah persepsi ini dapat dipahami dengan baik, maka akan mudah pula memahami mengapa sebuah komunitas bersikap dan melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu. Demikian pula akan mudah dipahami mengapa anggota masyarakat Islam di Kotagede banyak yang mengirim anak-anak mereka studi di UIN Sunan Kalijaga atau sebaliknya. Penelitian ini akan membuahkan pembuktian, bukan sekedar menerima asumsi-asumsi saja.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana muatan persepsi yang berupa kesan masyarakat Islam Kotagede terhadap sosok dan produk UIN Sunan Kalijaga dalam konteks studi keislaman ?
2. Bagaimana pula gagasan masyarakat Islam Kotagede terhadap UIN Sunan Kalijaga agar sosok dan produknya lebih fungsional menurut mereka ?
3. Mengapa persepsi masyarakat Islam Kotagede seperti itu ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Menggambarkan muatan persepsi masyarakat Kotagede yang dikenal sebagai “masyarakat Islam” terhadap sosok dan produk UIN Sunan

Kalijaga yang sekalipun telah berubah bentuk menjadi “Universitas” namun masih tetap mempertahankan studi keislaman di tengah-tengah persaingan pengembangan Perguruan Tinggi di Yogyakarta khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Disamping itu juga akan dijelaskan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi munculnya persepsi tersebut.

- b. Menjelaskan gagasan kolektif masyarakat Islam Kotagede terhadap sosok dan produk lulusan UIN Sunan Kalijaga yang mereka pandang fungsional untuk pengembangan UIN Sunan Kalijaga pada masa depan, khususnya berkaitan dengan kelenturan studi keislaman di dalamnya.

2. Kegunaan

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga pendidikan apa saja yang mencoba untuk mengembangkan studi keislaman, terutama kalau dikaitkan dengan pengguna jasa dalam konteks masyarakat yang kondisinya seperti masyarakat Islam Kotagede.
- b. Memberikan gambaran yang lebih otentik apa sebenarnya yang menjadi tuntutan nyata masyarakat pengguna jasa Perguruan Tinggi Islam yang di dalamnya masih mengembangkan studi keislaman. Dengan demikian akan lebih memperjelas model studi keislaman yang lebih lentur terhadap kemajuan masyarakat Islam dan sekaligus tepat dalam melayaninya.

D. Studi Pustaka

Dalam studi pustaka ini akan dijelaskan pustaka tentang Perguruan Tinggi Islam dan pustaka tentang Kotagede. Untuk pustaka jenis yang pertama, ada buku yang berjudul *Konsep Universitas Islam* karangan Dr. Hamid Hasan Bilgrami dan Sayid Ali Asyraf (Bilgrami, 1989). Buku ini menggambarkan secara umum bagaimana sebaiknya usaha membangun kembali universitas Islam pada zaman modern dewasa ini. Di sini dibicarakan dasar-dasar epistemologis tentang keilmuan yang harus dikembangkan berdasar pertimbangan sejarah perkembangan bentuk-bentuk lembaga perguruan yang pernah ada dalam sejarah dunia Islam sejak agama Islam lahir. Dalam buku ini juga disinggung tentang persyaratan untuk usaha pengembangan universitas Islam. Namun begitu, pustaka ini belum melengkapi informasinya tentang bagaimana persepsi dan perkembangannya dalam masyarakat Islam terhadap perkembangan perguruan yang pernah ada dalam sejarah dunia Islam tersebut. Dengan demikian buku ini belum memetakan jalinan hubungan antara pendirian perguruan dengan persepsi masyarakat Islam selaku pengguna jasanya.

Pustaka berikutnya adalah *Konsep Pendidikan dalam Islam* buah karya Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas (Al-Attas, 1990). Pengarangnya mengemukakan unsur-unsur esensial dalam pendidikan Islam, yaitu meliputi : konsep agama (*ad-din*), konsep manusia (*al-insan*), konsep ilmu (*al-'ilm, al-ma'rifah*), konsep kebijaksanaan (*al-hikmah*), konsep keadilan (*al-'adl*), konsep amal (*al-'amal* sebagai *al-adab*), dan konsep universitas (*al-kulliyah al-jami'ah*) (Al-Attas, 1990: 8). Berkaitan dengan universitas, Syed Muhammad Al-Naquib

Al-Attas menegaskan perlunya “ilmu-ilmu agama” sebagai hal yang bersifat *fardlu ‘ain* (ilmu yang wajib dikuasai setiap muslim), dan “ilmu-ilmu rasional, intelektual, dan filosofis” yang bersifat *fardlu kifayah* (yang memiliki bakat dan kemampuan perlu menguasainya). Menurut dia, ilmu itu tunggal. Namun begitu, ilmu harus diislamisasikan, dalam arti bahwa ilmu tidak boleh ditafsirkan berdasar perspektif sekuler yang menonjolkan prinsip dualisme. Walaupun ide-ide islamisasi universitasnya amat baik, namun masalah persepsi dari calon pengguna jasa universitas yang diidealkannya belum disinggung.

Pustaka lain yang berjudul *Penelitian Pendidikan dan Pendidikan Islam di Indonesia* yang dikarang oleh Dr. Muchtar Buchori, pakar pendidikan, mantan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta (Buchori, 1994). Dalam salah satu artikel di dalamnya diberi judul “Merancang Pendidikan Ulama untuk Menyongsong Masa Depan Bangsa Indonesia”. Dalam artikel tersebut ditulis tentang fungsi pokok dari Perguruan Tinggi Agama Islam. Pustaka ini belum menyinggung tentang arti penting penelitian terhadap persepsi masyarakat Islam selaku pengguna jasa terhadap Perguruan Tinggi Agama Islam tersebut.

Untuk pustaka jenis kedua, yakni tentang Kotagede. Pertama, *Kuta Gede*, sebuah pustaka lama karangan H.J.van Mook (van Mook, 1972). Buku ini berusaha melukiskan kenyataan dari sebuah daerah kota yang didirikan dan dikembangkan berdasar prinsip-prinsip adat pribumi, yaitu adat Jawa. Pustaka ini menggambarkan kondisi Kotagede pada masa awal abad ke -20, misalnya penduduk Kotagede pada waktu itu terpilah menjadi 4 (empat) golongan, yaitu :

abdi dalem (hamba raja), penduduk kaya (pedagang permata, perhiasan emas dan perak), tukang dan pedagang kecil, serta buruh harian dan petani. Tentang kehidupan beragama dan kemajuan pendidikan tidak disinggung. Yang banyak dibicarakan adalah masalah ekonomi dan kondisi daerah.

Pustaka kedua, *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin*, yang aslinya berjudul *The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town*, karangan Dr. Mitsuo Nakamura (Nakamura, 1983). Pustaka yang semula karya disertasi ini lebih merupakan deskripsi historis-etnologis Kotagede. Dalam buku ini digambarkan bagaimana suasana pergumulan dinamik antara agama Islam (lewat dakwah yang dilakukan Muhammadiyah) dengan tradisi lokal (adat setempat). Di sini belum disinggung tentang masalah persepsi masyarakat Islam Kotagede tentang hal-hal yang menyangkut studi keislaman, apalagi kalau dikaitkan dengan Perguruan Tinggi Agama Islam.

Pustaka ketiga, *Kotagede Pesona dan Dinamika Sejarahnya* (Tim Peneliti, 1997). Pustaka ini merupakan hasil penelitian sebuah lembaga swadaya masyarakat, Lembaga Studi Jawa (LSJ). Buku ini mendeskripsikan tentang Kotagede yang meliputi sejarah, tata kota, peninggalan sejarah, tata masyarakat, mata pencaharian, perekonomian, bangunan rumah, dan keberagaman masyarakat di Kotagede. Di sini juga belum disinggung masalah persepsi masyarakat Islam Kotagede terhadap lembaga perguruan tinggi keislaman. Buku ini lebih menfokuskan pendekatan antropologis.

Pustaka keempat, berjudul *Kampung Santri Tatanan dari Tepi Sejarah* (Riyadi, 2001). Salah satu bab dalam pustaka ini membicarakan tentang Kotagede, seputar wilayah, sejarah, hubungan sosial masyarakat, dunia kejawen, dan monumen peninggalan sejarah. Masalah persepsi masyarakat Islam Kotagede terhadap perguruan keislaman tidak disinggung sama sekali.

Hasil penelitian (Tesis) yang dilakukan oleh Drs. M. Jamroh Latief, yang berjudul *Studi Deskriptif Tentang Pengelolaan Lembaga Pendidikan Dasar di Kotagede Yogyakarta, Tahun 2003* (Program Studi Sosiologi, Konsentrasi Agama dan Perubahan Sosial, UGM Yogyakarta). Penelitian ini difokuskan pada bagaimana lembaga pendidikan dasar di Kotagede merespon aspirasi komunitas santri Kotagede Yogyakarta dalam upaya mengembangkan lembaganya. Sebagai kota yang pada zaman dahulu dikenal sebagai kota suci dan peziarah orang Jawa, pusat kejawen dan pusat kaum abangan, dapat berubah sedemikian rupa sehingga menjadi pusat kaum santri (1965). Perubahan sosial yang sedemikian cepat itu, tidak terpisahkan dengan peran dan gerakan organisasi Muhammadiyah antara lain melalui lembaga pendidikan. Ternyata komunitas santri Kotagede tidak lagi “primordial Islam”, misalnya Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Diniyah, tetapi memilih sekolah berdasarkan kualitas lembaga pendidikan tersebut.

Penelitian , Skripsi 2008, yang ditulis oleh Ema Rosita, *Konsep dan Strategi Pekerja Muslimah Dalam Pengasuhan Anak Di Kalurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta*. Di sini titik tekannya adalah bagaimana pekerja muslimah Kotagede (dengan sampel muslimah Purbayan) menjalankan kewajiban sebagai ibu dalam pengasuhan anak ditilik dari konsep dan strateginya,

Berdasarkan penjelajahan terhadap beberapa pustaka dan penelitian di atas, pembahasan atau penelitian yang khusus membicarakan tentang persepsi masyarakat Islam Kotagede tentang masalah studi keislaman yang bersangkutan dengan Perguruan Tinggi Agama Islam belum ada. Di sinilah letak titik sumbangan penulis dalam menggambarkan tentang masyarakat Islam Kotagede.

E. Kerangka Teoritik

1. Persepsi.

Dalam perspektif psikologis, persepsi adalah suatu proses menginterpretasi atau menafsirkan informasi yang diterima lewat alat indera manusia; indera mata dalam melihat gambar dan membaca, mendengarkan suara atau informasi auditif dan sebagainya (Suharnan, 2005: 23). Dalam persepsi, pengetahuan yang telah dimiliki (yang disimpan dalam ingatan) dipakai sebagai bahan untuk menangkap, mendeteksi, dan menginterpretasi rangsangan yang masuk lewat alat indera manusia (Suharnan, 2005 : 23). Dengan demikian perbedaan kekayaan pengetahuan seseorang sangat berpengaruh dalam menangkap, mendeteksi, dan menginterpretasi terhadap sesuatu yang dihadapi.

Dalam perspektif psikologis, William James mengatakan bahwa persepsi adalah "*the conscieusness of particular material things present to sense*" (kesadaran tentang benda-benda material khusus yang hadir dalam dunia pengertian) (James, 1962: 318). Selanjutnya, kombinasi proses-proses kegemparan otak (*sensational brain-processes*) dan proses-proses ingatan otak (*reproductive brain-processes*) merupakan proses yang mengisi muatan persepsi

seseorang (James, 1962: 318). Ini berarti, kemampuan otak seseorang dalam mengolah dan mengingat kembali terhadap stimulus (rangsangan) indera yang pernah terekam sangat berpengaruh terhadap hasil persepsi seseorang yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan di atas, yaitu dalam perspektif psikologis, yang disebut “persepsi” adalah , *pertama*, kesadaran seseorang tentang hal-hal yang masuk (stimulus) lewat alat indera (melihat, mendengar, membaca). *Kedua*, terjadi proses penangkapan, pendeteksian, penginterpretasian terhadap stimulus tersebut. *Ketiga*, hasil penangkapan, pendeteksian, dan interpretasi stimulus banyak dipengaruhi oleh kemampuan otak seseorang dalam mengolah dan mengingat kembali stimulus yang ada serta kekayaan pengetahuan orang sebelumnya.

Persepsi psikologis ini dalam prakteknya dapat melebar ke persepsi sosial (*social perception*). Menurut W.A. Gerungan, persepsi sosial adalah kemampuan melihat dan memahami secara cepat pada perasaan, sikap, dan kebutuhan orang lain (Gerungan, 1980: 138). Pengertian persepsi sosial seperti itu akan lebih nampak jelas kalau dikaitkan dengan masalah kepemimpinan (Gerungan, 1980: 138).

Berpangkal dari pengertian persepsi sosial di atas inilah yang akan dipakai dalam konteks penelitian ini. Ada dua kata kunci untuk memahami konstruksi “persepsi sosial” tersebut, yaitu : **sikap** dan **kebutuhan**. Yang dimaksud dengan “sikap” adalah tindakan sebagai hasil (produk) dari proses sosialisasi, dimana seseorang menampakkan reaksi sesuai dengan rangsang (stimulus) yang

diterimanya (Mar'at, 1981: 9). Menurut Mar'at, dalam sikap tersebut terdapat faktor **penilaian**, sebab memang **nilai** (*value*) yang menyebabkan terjadinya konsistensi organisasi tingkah laku seseorang (Mar'at, 1981: 11,17). Sudah tentu dangkal-dalam dan tumpul-tajamnya penilaian ini akan banyak dipengaruhi oleh pengetahuan yang telah dimiliki seseorang ketika seseorang dihadapkan kepada sesuatu objek (Suharnan, 2005: 23).

Dalam faktor penilaian tersebut, unsur paling dasar yang harus ada adalah unsur **kesan**, atau tangkapan awal sebagai hasil pengamatan yang bernuansa spekulatif. Kesan ini makin menguat manakala secara eksternal memperoleh pembenaran, misalnya saja berupa bukti fakta sosial yang mendukungnya.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan istilah “kebutuhan” ialah dorongan agar terpenuhi sesuatu sebagai akibat dari motivasi yang menyertainya. Salah satu motivasi yang menjadi faktor pemicu kebutuhan adalah faktor **idealisasi**, yakni terpenuhinya harapan aktualisasi diri secara ideal (Maslow, 1992: 31), terutama dalam menghadapi masa depan yang cenderung berubah (Maslow, 1992: 23, 25). Dalam idealisasi tersebut terdapat potensi yang bekerja pada diri setiap orang, yaitu proses-proses kreatif yang antara lain berupa **gagasan**. Yang dimaksud gagasan di sini adalah sebuah konstruk kognitif yang tergambar secara jelas berdasar modal pengetahuan yang dimiliki sebelumnya yang dalam konstruk kognitif tersebut tergambar jaminan kebutuhan yang lebih baik. Dalam konsep gagasan seperti ini, individu berhasrat untuk berhasil memiliki kompetensi dan kendali terhadap efek lingkungannya (Koeswara, 1989: 6).

Dengan demikian pengertian “persepsi” yang diangkat dalam penelitian ini adalah kemampuan melihat suatu obyek berdasar penilaian yang berupa kesan yang berkembang serta idealisasi yang berupa gagasan yang muncul.

2. Perguruan Tinggi Agama Islam

Menurut Syed Hussein Alatas, mengutip pendapat Jamaluddin Al-Afghani (1838-1897), bahwa salah satu faktor penyebab kemunduran kaum muslimin adalah karena ketiadaan semangat intelektual di dalamnya (Alatas, 1988: 17-18). Lebih serius lagi, kata Syed Husein Alatas, para pemimpin agama Islam telah kehilangan minat intelektual sehingga terjadi ketidakfungsionalan intelektual muslim dalam dunia Islam. Kemudian timbul keterbelakangan umat Islam dalam jangka waktu yang lama (Alatas, 1988: 19) bahkan sejak abad ke -18 (Alatas, 1988: 18)⁵.

Ketika dunia Islam ingin bangkit kembali, maka salah satu pilihannya adalah dengan mengembangkan kembali perguruan tingginya. Sebab, lewat lembaga perguruan tinggi itulah akan memungkinkan secara lebih cepat menghasilkan para intelektual yang diharapkan mampu menjadi aktor perubahan, walaupun sebenarnya untuk menjadi intelektual tidak harus berlatar pendidikan perguruan tinggi atau bergelar akademis (Alatas, 1988: 13). Dalam konteks

⁵ Dalam Islam nampaknya disepakati, bahwa ilmu itu pada hakekatnya tunggal. Karena itu, dalam konteks Islam tidak ada sebutan “ilmu agama” dan “ilmu sekuler (non agama)”. Namun ketika para pakar Islam mencoba merumuskan atas ketunggalan ilmu tersebut berbeda-beda pendapat. Pendapat pertama, ilmu apapun pada hakekatnya harus bermuatan nilai-nilai keislaman atau dasar spiritualitas segala ilmu itu adalah Islam yang meng-Esakan Allah s.w.t. Aliran ini dikenal dengan sebutan “islamisasi ilmu pengetahuan”. Tokohnya Dr. Ismail Al-Faruqi, Syed Hussein Alatas, dan Syed Naquib Alatas. Pendapat kedua, Islam itu disamping sebagai “agama /ad-din” tetapi juga dapat diilmukan. Aliran ini disebut dengan “pengilmuan Islam”. Tokoh dari aliran ini adalah Dr. Kuntowijoyo. Pendapat ketiga, ilmu agama dan ilmu umum (sekuler) berhubungan sintesis, entah pada tataran filosofis, metodologis, maupun substantif. Aliran ini di UIN Sunan Kalijaga disebut “integrasi dan interkoneksi ilmu”. Dalam tesis ini tidak diperdalam lagi.

Indonesia, salah satu arah yang dituju adalah untuk menyediakan sumber daya manusia (SDM), baik dalam kemampuan akademik maupun profesional (Febrian, 2000: 9-10).

Dalam konteks Islam di Indonesia, kaum intelektual yang mampu memajukan ajaran-ajaran Islam memang sangat diperlukan (Azra, 1999: 159). Hal ini dimaksudkan untuk usaha mengimbangi para intelektual baru hasil pendidikan model Barat yang disebut “cendekiawan sekuler” (Azra, 1999: 159). Menurut Harry Benda, sebagaimana dikutip oleh Azyumardi Azra, intelektual baru hasil pendidikan Barat tersebut terlatih berpikir secara Barat (Azra, 1999: 159-160). Sementara itu, menurut G.H. Jansen, para intelektual baru tersebut telah mengalami *brain washing* dari hal-hal yang berbau Islam dan sebagai akibatnya adalah mereka menjadi terasing atau teralienasi dari ajaran-ajaran Islam dan umat Islam (Azra, 1999: 160). Kalau di Indonesia jumlah Islamnya mayoritas, hasil sensus tahun 2000 tidak kurang dari 88,22% jumlah penduduk Indonesia 201.241.999 orang (Suryadinata, 2003: 102-103), maka ini berarti tuntutan terpenuhinya sumber daya manusia (SDM) intelektual Islam sungguh-sungguh diperlukan. Untuk memenuhi tuntutan itu maka lembaga Perguruan Tinggi Agama Islam perlu memperoleh perhatian utama.

Dalam sejarah kependidikan Islam, level Perguruan Tinggi telah dikenal sejak Abad Pertengahan. Dalam kurun waktu itu dikenal Universitas Al-Azhar di Mesir dan Madrasah Nizamiyah di Irak (Bilgrami, 1989: 39-49). Pada abad ke-19 akhir dan abad ke-20 beberapa negara Islam mengembangkan Perguruan Tinggi

mereka, misalnya Mesir, Turki, Pakistan, India, Bangladesh, dan Sudan (Bilgrami, 1989: 49-58).

Pada masa itu tidak ada pembedaan sebutan antara Perguruan Tinggi ilmu sekuler dan Perguruan Tinggi ilmu agama. Karena mula-mula ilmu yang dikembangkan adalah ilmu-ilmu tentang sumber, yaitu yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Setelah wilayah kekuasaan Islam semakin meluas, maka persentuhan dengan budaya intelektual yang lain, misalnya budaya Hellenisme di daerah Syria menjadi lebih intensif. Muncullah Ilmu Kalam (Teologi Islam), Ilmu Fikih (Hukum Islam), Filsafat Islam, Sains (Biologi, Kimia, Astronomi, Kedokteran, Optik dll.) dan Tasawuf (Bilgrami, 1989: 6-12, 14-21). Pada waktu itu ilmu tidak dipecah menjadi ilmu umum dan ilmu agama. Ilmu adalah satu. Hanya saja ilmu agama menjadi teman seiring untuk memberi "nilai" di dalamnya dalam arti perkembangan ilmu masih tetap dituntun oleh sinar petunjuk agama. Pada waktu inilah muncul ulama-ulama yang memiliki kemampuan ilmu gabungan antara ilmu sekuler dengan ilmu agama sekaligus.

Ketika Bani Abbasiyah runtuh dan Baghdad jatuh di tangan Holako Khan (1258 M.) dan ditambah lagi dengan lenyapnya kekuasaan Kerajaan Islam Andalusia setelah kota Granada jatuh (1492 M.), maka mulai abad ke-15 umat Islam tidak lagi memiliki pusat pendidikan yang dapat diandalkan. Sejak saat itu, disamping ilmu-ilmu tidak berkembang, apalagi setelah ditambah konsentrasi ilmu hanya difokuskan pada ilmu-ilmu yang bersumber pada wahyu semata-mata (Bilgrami, 1989: 21,22). Pada akhirnya nyaris yang dikenal hanyalah "ilmu agama". Ilmu-ilmu yang tergolong ilmu agama pada abad pertengahan adalah : (a)

Al-Lughah (bahasa Arab); (b) *An-Nahwu wa-sharaf* (tata bahasa Arab); (c) *Al-Balaghah* (retorika); (d) *Al-Adab* (sastra Arab); (e) *Al-Qira'ah* (membaca Al-Qur'an); (f) *At-Tafsir wa ushulut-tafsir* (tafsir dan asas-asas tafsir); (g) *Al-hadits wa ushul al-hadits* (*hadis dan asas-asas hadis*); (h) *Al-fiqh* (hukum Islam); dan (j) *At-tauhid, al-kalam, ushuluddin* (teologi Islam) (Bilgrami, 1989: 48-49). Secara umum dapat diringkas bahwa ilmu agama terdiri dari : (a) ilmu sumber/teks (Al-Qur'an dan As-Sunnah); (b) ilmu alat (bahasa Arab dan sebagainya); (c) ilmu metode/metodologi (*ushul, manhaj*).

Setelah Baghdad jatuh (1258 M.), mulailah terjadi eksodus para pedagang-ulama dari Timur Tengah ke wilayah-wilayah yang berdekatan sampai yang jauh. Diantara mereka ada yang sampai negeri Nusantara di sekitar abad ke-13 akhir. Sementara menurut G.W.J.Drewes, bahwa Islam yang masuk ke Nusantara adalah “ketika agama ini sudah mencapai bentuk definitifnya” (von Grunebaum, 1983: 325). Maksudnya, adalah Islam yang sudah mulai mengalami kemunduran, yang antara lain ditandai matinya *ijtihad* dan ilmu hanya diarahkan pada ilmu agama di atas.

Di Nusantara umumnya, dan di Jawa khususnya, dalam masa kemunduran itulah munculnya pendidikan dalam masyarakat. Saat itu muncul lembaga pesantren yang secara definitif bentuknya telah terlihat jelas sejak abad ke-18, sekalipun dalam sejarah dikatakan telah dirintis para *wali* (*wali songo*) sejak abad ke-14, yaitu yang dimulai pada masa wali Maulana Malik Ibrahim (1350-1419). Sementara itu ada dugaan bahwa Islam mulai masuk ke Jawa (di Tuban dan sekitarnya) sejak abad ke-11. Dalam lembaga pesantren tersebut dipelajari

literatur yang berhuruf dan berbahasa Arab dan isinya tentang “ilmu-ilmu agama” yang telah mulai terpisah jauh dengan “ilmu-ilmu umum (seperti fisika, kimia, astronomi, ilmu hitung, kedokteran, dan sebagainya). Kitab-kitab atau literatur-literatur semacam itu dikenal dengan sebutan *kitab kuning*. Ilmu-ilmu agama Islam waktu itu, sekalipun ilmu alatnya juga dipelajari (seperti ilmu bahasa nahwu, sharaf, balaghah, ‘arudl wa al-qawafi, dan ilmu ushul/metodologi ushul al-fiqh, ushul al-din, ulum al-qur’an, ulum al-hadis, manthiq), namun di pesantren-pesantren tersebut tidak terjadi ijhtihad ilmiah yang baru, melainkan menerima saja isi *kitab kuning* tersebut dengan metode hafalan. Dengan adanya metode hafalan inilah pemerintah Belanda tidak menjadikan sistem pendidikan pesantren sebagai tonggak penataan sistem pendidikan umum untuk masyarakat “bumi putera” (pribumi) (Steenbrink 1986: 2-3).

Dalam perkembangannya, sebagian pesantren mulai mengintroduksi bentuk pendidikan berupa kelas, yaitu madrasah. Namun kurikulumnya masih tetap didominasi oleh muatan *kitab kuning*, hanya cara mengajarnya saja berubah menjadi pengajaran kelas. Ilmu-ilmu umum masih sangat jarang diajarkan. Setelah Politik Etis Belanda dilaksanakan sejak tahun 1901, sebagian masyarakat Islam mulai mendirikan sekolah, dengan memberikan pelajaran umum lebih banyak dari pada ilmu-ilmu agama. Akibatnya ilmu-ilmu agama sekedar menjadi bekal untuk peribadatan saja, tidak ditujukan sebagai usaha pengembangan ilmu-ilmu agama.

Akhirnya, beban pekerjaan untuk menyatukan kembali antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum dalam sebuah format keilmuan harus dipikul di

perguruan tinggi agama Islam, seperti IAIN/UIN. Untuk itu metode hafalan mulai diimbangi dengan metode kritis yang didukung oleh filsafat ilmu. Dalam sejarah pembaharuan pemikiran Islam, sampai dengan pertengahan abad ke-19 di Universitas Al-Azhar, pengajaran filsafat masih dilarang. Ketika Muhammad Abduh tampil dalam panggung sejarah, kondisi seperti ini mulai diubah, yaitu dengan mempelajari kembali ilmu filsafat yang hakekatnya untuk melatih berpikir kritis. Dengan filsafat ilmu itulah perguruan tinggi agama Islam akan mampu tergugah lagi menjadi lembaga tempat bersemainya kegiatan ijtihad ilmiah lewat kegiatan pengajaran dan penelitian-penelitiannya, dan usaha menyatukan kembali antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Arah seperti inilah kiranya yang disebut perguruan tinggi Islam yang ideal.

3. Masyarakat Islam Ideal

Untuk menggambarkan konsep tentang masyarakat Islam yang ideal tentu saja harus bersumber pada Al-Qur'an dan tidak hanya sekedar memotret kenyataan faktual masyarakat yang terdapat dalam masyarakat Arab. Sebab, Islam adalah agama yang kebenaran ajarannya hanya bersumber pada Al-Qur'an (dan dijelaskan oleh As-Sunnah). Pemotretan terhadap masyarakat Islam dalam kesejarahannya hanyalah untuk memberikan perluasan wawasan saja ketika memahami apa sebenarnya "masyarakat Islam ideal" yang dikehendaki oleh Al-Qur'an.

Dalam Al-Qur'an dikenal beberapa istilah dalam konteks pembicaraan tentang masyarakat Islam ini, yaitu : *ahl* (*ahlun*), *qaum* (*qaumun*), *millah*

(*millatun*) (Soetopo, 1991:10-15), *sya'b* (*sya'bun*), *qabilah* (*qabilatun*), dan *ummah* (*ummatun*). *Ahl* menunjuk pada arti kelompok sosial kecil yang berwujud keluarga (sebagian muslim memberi label dengan istilah *ahl al-bait*). Selanjutnya dipakai dalam pengertian, seperti kata *ahl al-jannah* (kelompok orang yang berhasil masuk ke dalam surga), *ahl an-nar* (kelompok orang yang terpaksa masuk ke dalam neraka), dan sebagainya. Kata *qaum* menunjuk arti kelompok sosial yang terikat oleh kesukuan dalam arti umum. Sementara itu *sya'b* juga dapat diartikan kelompok sosial kesukuan juga, namun suku yang diikat oleh kepemimpinan seorang kepala suku (kepala klen/*clean*) seperti suku Quraisy umpamanya. Selanjutnya, *millah* dapat diartikan kelompok sosial yang mengikuti paham atau “jalan” yang disetujui. Dengan lain perkataan, sekelompok orang yang berkumpul yang disebabkan adanya persamaan paham atau “jalan” yang telah disepakati. Sementara itu *qabilah* juga mirip pengertiannya dengan *millah*. Bedanya, kalau *qabilah*, pada awal pemakaiannya, masih dikaitkan dengan *sya'b*, yaitu ikatan kesukuan tersebut disimbolkan dengan percampuran darah (anggota baru suku harus meminum beberapa tetes darah dari kepala suku yang akan dimasuki). Terakhir, istilah *ummah* berarti kelompok sosial, yang didasarkan ikatan keagamaan (religiositas). Dalam Al-Qur'an misalnya disebut “*ummatan wasathan*” (QS Al-Baqarah, 2 : 143) adalah berarti kelompok sosial yang religius (yakni umat Islam) yang memiliki sifat menengah (moderat) terhadap keyakinan religius lain di tengah masyarakat luas.

Menurut penulis, dari sekian istilah yang disinggung Al-Qur'an di atas, maka istilah yang lebih dekat dapat dipakai dalam konteks pembicaraan tentang

“masyarakat Islam ideal” adalah istilah *ummah*. Rasulullah SAW ketika hidup beliau sangat mencermati kenyataan faktual *ummah* yang mengelilingi beliau waktu itu. Pada masa Rasulullah SAW hidup masyarakat Arab di Mekkah khususnya dibedakan menjadi dua, yaitu ‘Arab dan A’rab. Masyarakat ‘Arab adalah masyarakat yang kebanyakan tinggal di kota-kota (khususnya Mekkah), memiliki rumah-rumah permanen, disebut *Ahl al-Madar*, dan menjadi pusat peradaban. Sedangkan masyarakat A’rab adalah masyarakat yang bertempat tinggal di desa-desa dan rumahnya kebanyakan terdiri dari tenda-tenda saja, mereka disebut *Ahl-al-Wabar*. Hidup mereka tidak menetap, berpindah-pindah (nomaden) (Karim, 2002: 233).

Masyarakat ‘Arab merupakan masyarakat perdagangan. Banyak di antara mereka yang sukses menjadi pedagang internasional (*rihlat at-tijarah*) seperti yang dilakukan oleh suku Quraisy yang berdagang dalam jalur Yaman-Mekkah-Syria (Al-Quraisy, 106: 2). Mereka kaya dan berpengaruh secara kebudayaan, adat, dan politik. Sekalipun Rasulullah SAW termasuk dari keluarga besar suku Quraisy yang tergolong kaya dan berpengaruh di atas, namun beliau membangun masyarakat bukan didasarkan pada alasan kekayaan harta dan status sosial, melainkan beliau dasarkan pada kuatnya penghayatan keimanan kepada Allah SWT. Dari masyarakat yang berpangkal pada kekuatan religiositas inilah beliau membangun masyarakat Islam yang pertama dan masih bersifat embrional. Walaupun begitu, ada beberapa unsur yang sudah beliau tanamkan pada masyarakat Islam pertama tersebut (*ummah*) dengan ciri-ciri antara lain, **pertama**, berakhlak mulia. Dalam hal ini beliau contohkan dirinya sendiri yang dikenal

sebagai sosok pribadi yang amanah, terpercaya, sehingga beliau diberi gelar “*al-amin*”. Berakhlak mulianya didasarkan pada kesadaran sendiri, bukan karena dipaksa dari faktor luar. Ahmad Syafi’i Ma’arif menyebut *self-imposed discipline* (Ma’arif, 1995: 129). **Kedua**, sejahtera secara lahir (sosial) dan batin (spiritual). Konsep ini dijabarkan dengan ungkapan umum, yaitu sejahtera di dunia dan akhirat. Pengalaman kehidupan menunjukkan, bahwa kecenderungan ekstrem untuk memilih hanya satu sisi kesejahteraan saja ternyata timpang dan tidak produktif. Kaum yang berpaham materialisme umpamanya, mereka secara ekstrem hanya memilih satu sisi kesejahteraan lahiriyah, keduniaan, dan kebendaan saja. Akibatnya, mereka kurang menghargai martabat kemanusiaan. Semuanya hanya diukur dari produktifitas dan kesejahteraan material. Karena itu, kesejahteraan hidup yang didasarkan hukum keseimbangan, yang menurut Muhajir Efendy disebut *equilibrium society* atau masyarakat yang berkeseimbangan (Effendy, 2002: 1-15), nampaknya merupakan pilihan yang terbaik. **Ketiga**, menjunjung tinggi keadilan. Sifat, sikap dan kondisi adil, bagi manusia secara universal, adalah menyenangkan. Dengan keadilan tersebut maka hak dan kewajiban siapa pun akan menjadi terjaga. Dengan keadilan tidak ada yang merasa didiskriminasi atau merasa diistimewakan secara tidak proporsional. Dengan keadilan pula kehidupan menjadi berjalan secara serasi dan selaras. Mengingat betapa pentingnya masalah keadilan ini, Al-Qur’an mengaitkan masalah keadilan dengan ketakwaan seorang muslim. Bahwa ketakwaan yang merupakan martabat tertinggi dalam keimanan tidak akan tercapai sepenuhnya jika tanpa keadilan diterapkan dalam kehidupan (QS Al-Maidah, 5: 8). **Keempat**,

keterbukaan atas perbedaan. Bahwa kenyataan di alam dunia ini terdapat kamajemukan (pluralitas). Ada siang ada malam, ada laki-laki ada perempuan, ada kebaikan ada keburukan, dan sebagainya. Tunggal dan esa hanya milik Tuhan. Karena itu sangat mungkin akan terjadi perbedaan dalam bersikap, berpikir, dan berwawasan, dan berpendapat. Karena itu dasar kehidupan harus ada kata “saling”, misalnya saling menghormati, saling menghargai, saling menolong, saling mengingatkan, dan sebagainya, merupakan hal yang sangat dipentingkan dalam Al-Qur’an (QS Al-Hujurat, 49: 13; QS Al-Maidah, 5: 2; QS Al-Balad, 90: 17; QS Al-‘Ashr, 103: 3) *Kelima*, apresiatif terhadap perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan ke arah yang lebih positif dan produktif. Bahwa hidup dan kehidupan ini senantiasa mengalami perubahan. Waktu juga terus-menerus berubah dari waktu ke waktu, hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Adaptasi terhadap perubahan zaman seperti itu ditekankan dalam Al-Qur’an (QS Al-Hasyr, 59: 18).

Dalam sejarah masyarakat Islam yang pernah ada, ternyata yang paling nampak diperhatikan umat Islam adalah perlunya keadilan sosial. Bahwa keadilan sosial baru dapat dikatakan berjalan sebagaimana mestinya kalau terpenuhi beberapa ciri sebagaimana tertulis di bawah ini (Aziz, 1999: 67-78).

Pertama dalam masyarakat terjalin rasa persudaraan. Persaudaraan di sini harus bersifat fungsional, artinya benar-benar diresapi dan dilaksanakan anggota masyarakat, misalnya tidak ada sikap rasialis, feodalistis, diskriminatif, dan sebagainya.

Kedua, dalam masyarakat terdapat semangat membela nasib orang miskin, orang lemah, dan orang yang dilemahkan (*mustadl'afun*), misalnya tidak ada sikap acuh tak acuh terhadap orang miskin, orang lemah atau orang yang dilemahkan, tidak ada penindasan, tidak ada kekejian dan kekejaman, tidak ada pemerasan, dan sebagainya.

Ketiga, dalam masyarakat terbangun watak dinamis, misalnya anggota masyarakat bersemangat untuk maju, menghargai terhadap perubahan-perubahan positif yang terjadi sesuai dengan tuntutan zaman, suka melakukan percobaan untuk menemukan hal baru, dan sebagainya.

Keempat, dalam masyarakat terbangun sikap menghargai pekerjaan dan prestasi kerja. Wujud konkrit dari sikap seperti ini misalnya merasa bangga terhadap pekerjaan yang ditekuni yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya, menjauhi pekerjaan membajak pekerjaan orang lain, suka belajar terhadap kesuksesan orang lain, memperhatikan kualitas pendidikan, dan sebagainya.

Kelima, dalam masyarakat terbangun sikap mengutamakan akhlak untuk “memberi”. Artinya setiap anggota masyarakat lebih suka berposisi siap memberi daripada suka minta tolong. Contoh konkrit sikap seperti ini misalnya terpacu suka bekerja agar mampu memberi kepada orang lain, merasa lebih terhormat disuruh mengerjakan pekerjaan kasar daripada sekedar disantuni (diberi), terdorong untuk memecahkan masalah secara maksimal dahulu daripada bersegera untuk minta tolong kepada orang lain.

Keenam, dalam masyarakat terbangun sikap lebih mementingkan orientasi ke masa depan dan matang dalam merumuskan rencana. Artinya, pengalaman

masa lalu sebagai modal untuk berusaha lebih positif untuk masa depan yang penuh tantangan, misalnya terbiasa menyusun rencana sesuai prinsip manajemen kerja, segala pekerjaan diukur berdasar tujuan dan target yang akan dicapai, dan sebagainya.

Ketujuh, dalam masyarakat terbangun sikap suka menjadi pionir dan matang menghadapi tantangan. Contohnya Rasulullah SAW berani menempuh tantangan hijrah.

Kedelapan, dalam masyarakat terbangun sikap ekonomis dan produktif. Artinya, masyarakat berusaha keras memanfaatkan daya kreatifitasnya untuk meraih keuntungan ekonomis, misalnya suka menciptakan lahan pekerjaan, memanfaatkan potensi usaha, memeras daya kreatifitas, dan sebagainya.

Secara sosiologis, masyarakat dapat dipandang sebagai sebuah bangunan lembaga. Dalam lembaga semacam itu tentu akan ditemukan unsur-unsur pembentuknya, yaitu: (1) kelompok orang yang menjadi anggota masyarakat; (2) kegiatan interaktif antar orang (berupa pergaulan aktif sehari-hari); dan (3) norma pengatur interaksi antar orang (berupa peraturan yang telah disepakati anggota kelompok).

1. Kelompok orang

Kelompok orang di sini terikat oleh tempat (geografis), kesukuan (etnisitas), kebangsaan (nasionalitas), dan keagamaan (religiositas). Dalam konteks pembicaraan tentang “masyarakat Islam”, maka keterikatan dengan masalah keagamaan yang paling tinggi intensitasnya. Dalam kelompok orang yang bernuansa keagamaan seperti ini, dalam masyarakat Islam khususnya, terdapat

kebanggaan tersendiri dalam menampilkan identitas keislamannya yang berupa simbol-simbol keagamaan, seperti pakaian (seperti jilbab, sarung-songkok, jubah sorban), makanan halal (seperti non babi, non bangkai, non sesajen, non minuman memabukkan), kitab kuning (yang berisi ilmu-ilmu klasik keislaman), tempat peribadatan (langgar, mushalla, masjid, kain sajadah) dan karya seni (seperti qashidah, nasyid, kaligrafi, qira'ah), majelis ta'lim, perayaan hari besar Islam (seperti Isra' wa Mi'raj, Nuzulul Qur'an, Maulid Nabi, Idul Fitri) dan sebagainya. Semuanya itu dipandang sebagai syi'ar Islam (Azrara, 1999: 44-46).

2. Kegiatan interaktif antarorang.

Kegiatan interaktif antarorang dalam masyarakat Islam tampaknya tidak steril dari pengaruh kebiasaan setempat (lokal). Kebiasaan makan bersama (berwujud makan kenduri, tasyakuran), silaturahmi dalam waktu-waktu tertentu (anjangsana pada bulan Syawal, upacara pengantin, kelahiran bayi, khitanan, kematian), majelis taklim (di masjid, perayaan hari besar Islam), majelis wirid (bagi yang mengikuti kegiatan tarekat), wisata religi/ziarah kepada para ulama sepuh atau yang sudah wafat, semuanya menjadi kegiatan rutin anggota masyarakat Islam dan dianggap sebagai identitas simbolik yang perlu dipertahankan.

Sementara itu salat jamaah di langgar, mushalla, dan di masjid, baik yang ada di kota maupun di desa, juga merupakan kegiatan rutin yang telah menjadi kebiasaan. Gotong royong ketika menyelenggarakan kepanitiaan Idul Qurban atau zakat fitrah juga dijalankan. Tidak ketinggalan, kegiatan tabligh dan dakwah juga merupakan simbol kegiatan interaktif antarorang dalam masyarakat Islam, semua itu dianggap sebagai syiar Islam (Azra, 1999: 44-45).

3. Norma pengatur interaksi antarorang.

Norma pengatur interaksi antarorang dalam masyarakat Islam juga tidak terhindar dari percampuran dengan adat setempat, sekalipun secara normatif (semangatnya) diambil dari ajaran Islam. Penghormatan kepada orang yang lebih tua atau ulama, misalnya, norma pengaturnya ditunjukkan dengan ta'dzim cium tangan. Juga dalam menyebut nama orang ditandai dengan kata "*kang mas, mbakyu, pak dhe, bu dhe, pak lik, bu lik*", dan sebagainya untuk menyebut nama yang usia atau alur keturunannya lebih tua, dan sebutan "*Dhi Mas, Dhi Ajeng*" dan semacamnya untuk menyebut nama yang usianya lebih muda. Dengan demikian dapat dikatakan norma pengatur yang semula bersifat normatif murni, dalam praktiknya dibumbui dengan penghormatan lokal.

Dalam masyarakat Islam masih terdapat kebanggaan kalau ada sebutan "santri" yang diartikan artinya sebagai seseorang yang tergolong taat menjalankan perintah agama Islam, terutama Rukun Islam. Terasa kurang enak kalau disebut sebagai orang "abangan" yang sering diartikan orang muslim namun tidak menjalankan kewajiban agama, terutama Rukun Islam. Dalam hal tertentu, lebih menyejukkan interaksi antarorang adalah jika dalam suatu wilayah relatif homogen agamanya, misalnya hampir seluruhnya beragama Islam. Karena norma pengaturnya sama, yaitu norma-norma Islam, maka interaksi antarorang di dalamnya dapat lebih lancar, terbuka, dan saling menjaga nama baik.

Masyarakat Islam, khususnya di Indonesia yang pernah terjajah oleh bangsa Barat (Belanda) cukup lama, maka kondisi kekuatan ekonomi dan kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang berbasis pendidikan perlu dan sangat

membutuhkan perhatian. Sering dua kata kunci yang masih terus-menerus memerlukan perhatian, yaitu “miskin” dan “bodoh” (Priyono, 1985: 234-236). Pemaknaan kata “bodoh” di sini ada dua. *Pertama*, bodoh karena tidak menguasai ilmu-ilmu umum yang selama ini menjadi andalan dunia Barat untuk menguasai sumber-sumber alam, proses industri, dan pemasaran barang di seluruh dunia. *Kedua*, bodoh karena tidak berpikir dan bertindak inovatif dan produktif untuk mencapai kesejahteraan hidup sehari-hari secara layak. Hal ini kurang menguasai bidang keahlian dan ketrampilan. Dua macam kebodohan ini, salah satu sebabnya, adalah karena pesantren tempat para santri dahulu belajar kurang bahkan tidak sempat memperkenalkan ilmu-ilmu umum dan kurang memberikan latihan kerja atau ketrampilan yang berguna untuk kehidupan sehari-hari setelah keluar dari pesantren. Kelemahan SDM seperti inilah yang perlu diselesaikan oleh pendidikan pesantren, madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi saat ini dan masa datang.

Persoalan yang dihadapi masyarakat Islam dewasa ini adalah bukan wilayah lokal, melainkan keterkaitan kehidupan global dengan segala pengaruh yang dibawanya. Karena itu rumusan masyarakat ideal yang dicapai juga perlu memperhatikan tantangan-tantangan yang nyata, seperti gaya hidup penuh persaingan/kompetisi, terbuka terhadap hal-hal yang bersifat inovatif dan produktif, pilihan yang bersifat rasional dan argumentatif, dan ada kecenderungan hidup materialistis dan hedonis. Tantangan nyata semacam inilah yang dihadapi masyarakat Islam dewasa ini.

Di samping tantangan akibat globalisasi di atas, masih ada satu tantangan lagi, yaitu usaha untuk menerapkan konsep-konsep normatif dalam Al-Qur'an dan As-

Sunnah yang relatif murni dan menyeleksi secara proporsional terhadap hasil persentuhan Islam dengan kehidupan lokal (budaya dan tradisi setempat) atau hasil ijtihad budaya yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Usaha semacam inilah barangkali yang dapat mendukung terciptanya masyarakat Islam yang ideal.

F. Metode Penelitian

Penulis memilih penelitian lapangan dan bersifat kualitatif untuk kepentingan penulisan Tesis ini. **Pertama**, jenis data. Data yang diperlukan bersifat primer dan sekunder. Data primernya adalah data lapangan, data sekundernya adalah informasi dari literatur yang relevan, yang menyangkut ke-Kotagede-an, studi keislaman maupun institusi IAIN/UIN Sunan Kalijaga.

Kedua, teknik pengumpulan data. Karena penelitian ini menyangkut persepsi yang dalam merumuskannya tentu bersifat kualitatif, maka penulis memakai instrumen penelitian berupa kuesioner dengan memakai metode skala Likert. Skalanya disusun dalam 5 (lima) alternatif pilihan, yaitu :

- Sangat setuju : dengan kode angka 5
- Setuju : dengan kode angka 4
- Tidak tahu : dengan kode angka 3
- Tidak setuju : dengan kode angka 2
- Sangat tidak setuju : dengan kode angka 1.

Untuk memperjelas dan mempertegas pilihan dari responden terhadap pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner, responden diberi kesempatan untuk mengajukan alasan yang dapat dituliskan dalam kuesioner. Jawaban untuk ini

dalam rangka menjangking *penilaian* yang berupa *kesan* dari responden tentang institusi UIN Sunan Kalijaga pada umumnya. Selanjutnya dalam kuesioner responden juga diberi peluang untuk menuliskan pendapat/usulan yang berupa *gagasan* yang mungkin perlu disampaikan sebagai bagian integral dari pengertian persepsi yang menjadi pokok penelitian ini. Gagasan-gagasan yang tertulis tersebut merupakan cerminan dari *idealisasi* para responden mengenai lembaga UIN Sunan Kalijaga.

Alasan menggunakan kuesioner berskala dalam mengumpulkan data adalah : agar jawaban lebih mudah dipahami dan lebih tegas. Namun demikian untuk memperjelas jawaban, kalau masih diperlukan, dilakukan wawancara secara *purposive* dan dibatasi untuk memperjelas jawaban-jawaban yang memerlukan penjelasan lebih lanjut kepada pengisi kuesioner. Karena itu jawaban dari kuesioner berskala tetap menjadi sumber utama.

Responden berskala ini dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yang masing-masing kelompok berjumlah 3 (tiga) orang responden. Kelompok pertama adalah responden yang berlatar belakang pendidikan ilmu agama Islam (madrasah/pondok pesantren). Sedang kelompok kedua adalah responden yang berlatar belakang pendidikan ilmu umum (SMP, SMA,). Pembagian 2 (dua) kelompok seperti ini dengan alasan sekalipun kedua kelompok tersebut sama-sama beragama Islam (taat), namun diasumsikan pengaruh lamanya pendidikan yang berbeda tersebut akan berpengaruh besar dalam hal cara berpikir dan cara mengajukan wawasan/gagasan terhadap sesuatu hal.

Data primer lewat kuesioner berskala di atas dilengkapi dengan data dokumentasi monografi wilayah Kotagede.

Ketiga, teknik analisis data kualitatif. Pengolahan data dilakukan dengan cara memilah-milah data mentah dari lapangan yang langsung berkaitan dengan “persepsi masyarakat Islam Kotagede” dengan pilah data: data pengungkap tentang “sikap” (data penilaian masyarakat Islam Kotagede) dan data pengungkap tentang “kebutuhan” (data idealisme masyarakat Islam Kotagede).

Teknis analisisnya adalah dengan interpretasi terhadap kecenderungan terbanyak dari data yang telah terpilah dan juga interpretasi terhadap hubungan antar data yang tak terpisahkan ketika orang berbicara tentang persepsi. Dengan teknik analisis seperti di atas diharapkan dapat menghasilkan penggambaran dan pemahaman yang komprehensif tentang persepsi yang ada dalam kenyataan di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah “Pendahuluan”. Bab ini menggambarkan secara menyeluruh format penelitian yang akan dilakukan. Di dalamnya dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaannya, studi pustaka untuk memberikan gambaran posisi penelitian ini, kerangka teoritik, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasannya.

Bab II diberi judul “Masyarakat Islam Kotagede” yang mencoba untuk menggambarkan masyarakat Islam Kotagede, baik dari faktor eksternalnya,

maupun kenyataan internalnya. Di sini dibahas tentang wilayah hunian, kondisi perekonomian, kemasyarakatan serta keberagamaannya.

Bab III berjudul “UIN Sunan Kalijaga”. Bab ini menggambarkan secara global tentang UIN, tentang sejarahnya, keilmuan yang dikembangkan, dan perkembangan lima tahun terakhir.

Bab IV merupakan inti bahasan tesis ini tentang “Penilaian dan Idealisme Masyarakat Kotagede dalam Konteks Studi Keislaman di UIN Sunan Kalijaga”. Bahasannya meliputi penilaian masyarakat Islam Kotagede terhadap keberadaan kelembagaan dan studi keislaman di dalamnya serta bagaimana idealisasi terhadap keharusan UIN Sunan Kalijaga pada masa depan sebagai universitas dan bagaimana keharusan studi keislaman yang perlu dikembangkan, dan terakhir apa latar belakang di balik penilaian dan idealisasi masyarakat Islam Kotagede tersebut.

Bab V “Penutup”, meliputi kesimpulan dan saran yang perlu dikemukakan serta daftar pustaka yang dipakai dalam penelitian ini.